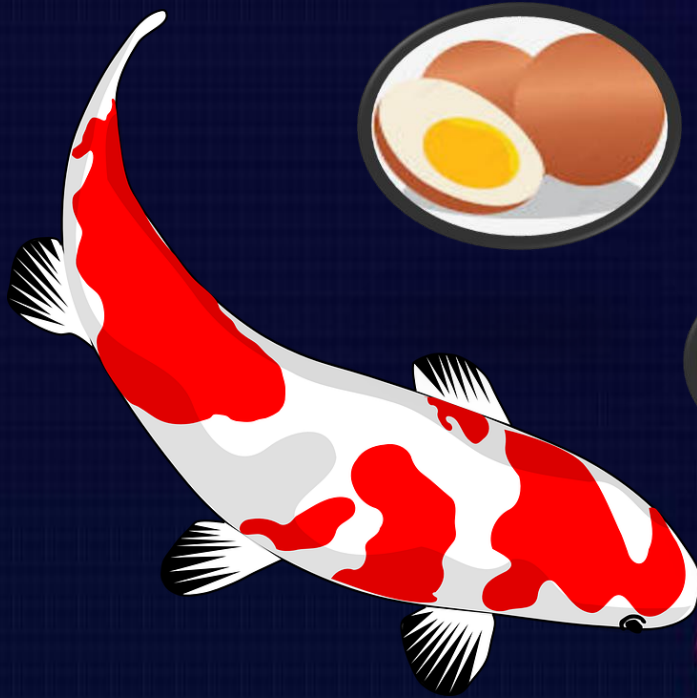




RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023



DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

Agustus 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Rencana kerja perubahan juga sebagai bentuk pengukuran kinerja, evaluasi serta bentuk penyampaian secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang merupakan hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian kami yakin dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2023 ini dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Blitar, 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR



TOHA MASHURI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700219 199003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Renja P OPD	6
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRI BULAN II TAHUN 2023	 10
2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai Tri Bulan II	21
 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 40
 BAB IV. PENUTUP	 56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sektor perikanan dan sub sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Blitar. Pembangunan peternakan dan perikanan mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah agraris penghasil ikan budidaya maupun tangkap serta komoditas peternakan (telur, susu dan daging), sehingga pembangunan sektor perikanan dan sub sektor peternakan perlu diletakkan sebagai prioritas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah mengingat dominasi sub sektor peternakan juga dalam pembentukan angka PDRB.

Pembangunan peternakan dan perikanan perlu disusun perencanaan yang didasari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Perencanaan pembangunan daerah juga sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan dalam upaya terselenggaranya “*Good Governance*” bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan strategik tersebut meliputi Rencana Strategik Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Renja OPD.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang peternakan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan selalu berupaya memfasilitasi peternak maupun petani ikan dalam meningkatkan usahanya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Renja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir tahun 2023. Renja Perubahan OPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Peternakan



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar nantinya lebih diarahkan pada “PEMBANGUNAN SDM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN BERBASIS KAWASAN” dalam rangka meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan. Kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha peternakan dan perikanan melalui peningkatan teknologi, pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta pelaku usaha peternakan dan perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

- d) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D);
- o) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
- p) Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) OPD ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam Perubahan RKPD dengan Renja Perubahan OPD.
- c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar.



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 atau sumber dana lainnya;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/ landasan guna menyusun kegiatan perubahan tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Renja Perubahan OPD

Penyajian dokumen Renja Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan P-Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja PD, proses penyusunan P-Renja PD, keterkaitan antara P-Renja PD dengan dokumen P-RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan P-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan



Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P-Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan P-Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian/*review* terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II dengan mengacu pada APBD Tahun 2023, serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/ langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja

3.1 Rencana Kerja

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja dalam perubahan RENJA-PD serta strategi pencapaiannya.

3.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Memuat indikator dan target kinerja dalam perubahan RENJA-PD.

3.2 Pendanaan



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Berisi uraian Penjabaran perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang dirincikan mulai dari Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (penjelasan tabel pendanaan dan rencana kerja PD yang bersumber dari SIPD/ lampiran Renja).

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta stempel instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Memuat Tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
(Print-Out SIPD)**



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRI BULAN II TAHUN 2023

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang akan dihadapi serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar, maka Kepala Daerah menetapkan visi pembangunan lima tahun adalah : “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)”

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi dalam Stimulasi Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Daya Saing pada Sektor Unggulan dan Potensial pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja melalui pembinaan dan pengembangan usaha di sektor perikanan dan sub sektor peternakan. Selain itu juga mempunyai peran dalam pembinaan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) peternak dan petani ikan sehingga hasil produknya memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar melalui pencapaian misi keempat yaitu “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dari kedua misi tersebut terperinci sebagai berikut :

Misi RPJMD	Misi/ Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi 4 Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Meningatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif Mandiri dan Berkelanjutan	Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Berdasarkan tujuan RPJMD, sasaran RPJMD dan indikator sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan indikator kinerja kunci Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, target capaian serta capaian kinerjanya pada tahun 2023

NO	INDIKATOR	SPM/ STAN DAR NASI ONAL	IKK	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	-	Produksi Perikanan Tangkap	2.300 Ton	1.430 Ton	2.663 Ton	2.796 Ton	2.283,4 Ton	1.454,3 Ton	2.300 Ton	2.796 Ton	Cuaca ekstrim dan biaya produksi berpengaruh pada produksi perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya	17.800 Ton	16.420 Ton	16.430 Ton	18.339 Ton	17.841 Ton	16.426,3 Ton	16.430 Ton	18.339 Ton	
				225.000.000 ekor	203.850.000 ekor	204.150.250 ekor	231.817.725 ekor	225.281.796 ekor	203.946.310 ekor	204.150.250 ekor	231.817.725 ekor	
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan		Presentase Peningkatan produktivitas peternakan	0,4%	0,1%	0,2%	0,5%	0,3%	0,16%	0,2%	0,5%	Kasus PMK, tingginya biaya produksi berpengaruh pada produktivitas
			Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar (%)	98%	95%	96%	98,1%	98,01%	95,05%	96%	98,1%	
			Presentase wilayah yang terkendai dari penyakit hewan menular strategis	80%	80%	80%	80%	NA	NA	80%	80%	

Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya. Analisa capaian indikator yang tidak sesuai dengan target diuraikan sebagai berikut:

1. Produksi Perikanan Tangkap

- Indikator produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1.454,3 Ton dari target sebesar 1.430 Ton. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 36,3%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 kondisi cuaca dan alam kurang menentu serta tidak bisa diprediksi, curah hujan cukup tinggi dan terjadi hampir sepanjang tahun. Kegiatan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh cuaca dan kondisi alam. Cuaca



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

dan kondisi alam yang kurang baik, apalagi dengan curah hujan yang tinggi, ombak tinggi serta angin kencang selama bulan September sampai dengan Desember menyebabkan nelayan tidak bisa dengan leluasa melakukan kegiatan penangkapan ikan, begitu juga dengan tingginya curah hujan, ikan sulit untuk ditangkap yang didukung sarana dan prasarana penangkapan ikan laut kita belum memadai.

Pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap diproyeksi mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan target 2.300 Ton dan pada hingga tribulan II telah terealisasi sebesar 1.103 Ton.

- b. Indikator produksi perikanan budidaya meliputi produksi perikanan konsumsi dan non konsumsi. Produksi perikanan budidaya konsumsi pada tahun 2022 sebesar 16.426,3 ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 16.420 ton. Jika dibandingkan dengan 2021, di tahun 2022 produksi perikanan budidaya konsumsi mengalami penurunan sebesar 7,9%. Sedangkan produksi ikan non konsumsi pada tahun 2022 terealisasi sebesar 203.946.310 ekor dari target sebesar 203.850.000 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, di tahun 2022 produksi ikan non konsumsi mengalami penurunan 9,2%.

Penurunan produksi perikanan konsumsi dan non konsumsi dari tahun 2021 disebabkan adanya kenaikan pakan yang cukup signifikan yang mengakibatkan biaya produksi tidak dapat mengimbangi harga jual ikan sehingga banyak pembudidaya yang gulung tikar maupun beralih ke komoditas lain. Adanya penurunan harga jual ikan gurami selama kurun waktu satu tahun juga mengakibatkan banyak pembudidaya gurami yang gulung tikar sehingga produksi tahun 2022 menurun drastis.

Pada tahun 2023 produksi perikanan konsumsi dan non konsumsi diproyeksikan naik dibandingkan tahun 2022. Pada Tribulan II produksi perikanan konsumsi terealisasi sebesar 8.260,83 Ton dengan target sebesar 16.430 Ton, sedangkan produksi non konsumsi teralisasi sebesar 97.960.679 Ekor dengan target sebesar 204.150.250 ekor.

- c. Indikator prosentase peningkatan produktifitas peternakan terealisasi dari target yang telah ditetapkan. Produktifitas peternakan yang dihitung



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

meliputi produktifitas ternak penghasil daging, telur dan susu. Beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan capaian peningkatan produktifitas ternak peternakan adalah penyediaan sarana dan prasarana produksi seperti penyediaan bibit, penyediaan bahan pakan ternak serta SDM, status kesehatan ternak yang mendukung produksi peternakan agar tetap optimal. Prosentase peningkatan produktifitas ternak di tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,2%,

- d. Indikator Prosentase Produk Peternakan yang Layak Edar pada tahun 2022 terealisasi 95,05% dari target sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,04. Hal ini didukung dengan adanya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan produk ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dan penyediaan sarana dan prasarana pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 96%, penetapan target ini mengalami kenaikan dari target dan realisasi pada tahun 2022.

- e. Indikator Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis di tahun 2021 dan 2022 belum terhitung sehingga belum dapat dibandingkan. Pada tahun 2023 indikator prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis ditargetkan 80%.



1.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Analisis SWOT isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

		Strength (S)	Weakness (W)
Analisis SWOT Isu-Isu Strategis		Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar	Pengaruh cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi perikanan
		Adanya regulasi tentang pengembangan kawasan budidaya dan akses permodalan pelaku usaha perikanan	Ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja internal kelembagaan yang terbatas
		Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten	Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas bidang
		Lingkungan sumberdaya Ikan yang relatif belum tercemar	Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu
		Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kabupaten Blitar	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
		Meningkatnya penanganan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS)	Fluktuasi Harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan
		Dukungan anggaran Pemerintah Daerah yang konsisten	Keterbatasan jumlah pakan dan bibit yang berkualitas
		Dukungan lingkungan kerja yang kondusif	Kurangnya jumlah dan kualitas SDM
		Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
		Kerjasama antar pegawai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas
Opportunity (O)	Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya	1. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur 2. Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja
	Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat		
	Tingginya potensi pasar nasional dan internasional		
	Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar		
	Kekompakan OPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak	Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak	Intensifikasi penanggulangan penyakit ternak
	Fluktuasi harga produk peternakan (telur)		
Threat (T)	Pelanggaran Peraturan Kelautan dan Perikanan dalam penangkapan Ikan	Mengembangkan upaya perikanan tangkap untuk mengoptimalkan produktivitas	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Kualitas Sarana dan Prasarana Budidaya dan Tangkap yang kurang memadai		
Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan		
Penurunan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan		
Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dan produksinya yang ASUH		Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal
Adanya investor Asing yang masuk ke Indonesia (MEA)		

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan sebelas (11) Strategi (St.) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar antara lain:

1. Penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap;
3. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya;
4. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
7. Optimalisasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
8. Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
10. Fasilitasi perizinan usaha pertanian/ peternakan;
11. Penyuluhan/ pendampingan usaha pertanian.

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

1. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah;
4. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
5. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
8. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota;
10. Optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
11. Penyelenggaraan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
12. Peningkatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
13. Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
14. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungau, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota;
15. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
16. Fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
17. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
18. Pengolahan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/ Kota;
19. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ Kota;



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

20. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer;
21. Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
22. Penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota lain;
23. Optimalisasi pembangunan prasarana pertanian;
24. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota;
25. Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota;
26. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota;
27. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ Kota;
28. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
29. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
30. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota;
31. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/ Kota;
32. Pelaksanaan penyuluhan pertanian serta pendampingan usahanya.

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis *Balanced Score Card* (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk tahun depan adalah sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur serta perencanaan dan pelaporan yang optimal			
No.	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	-	-



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

2.	Perspektif 2: Proses Internal	Menjamin terpenuhinya layanan administrasi , perencanaan serta pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3.	Perspektif 3: Kelembagaan	Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian	-
4.	Perspektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 2: Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan sebagai produk unggulan

No.	Prespektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Prespektif 1: Masyarakat	Mendorong optimalisasi ketersediaan produk hasil peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.	Prespektif 2: Proses internal	-	-
3.	Prespektif 3: Kelembagaan	-	-
4.	Prespektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 3: Intensifikasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

No.	Prespektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Prespektif 1: Masyarakat	Menjamin kondisi ternak bebas penyakit serta produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.	Prespektif 2: Proses internal	-	-
3.	Prespektif 3: Kelembagaan	-	-
4.	Prespektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 5: Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal peningkatan penyuluhan dan pembinaan usaha peternak

No	Prespektif	Kebijakan Umum	Program
1	Prespektif 1: Masyarakat	Menjamin keberlangsungan usaha peternakan sebagai penghasil produk protein	Program Penyuluhan Pertanian
2	Prespektif 2: Proses internal		
3	Prespektif 3: Kelembagaan	Menjamin adanya peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan dan SDM peternak	Program Penyuluhan Pertanian
4	Prespektif 4: Keuangan	Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beternak	Program Perizinan Usaha Pertanian



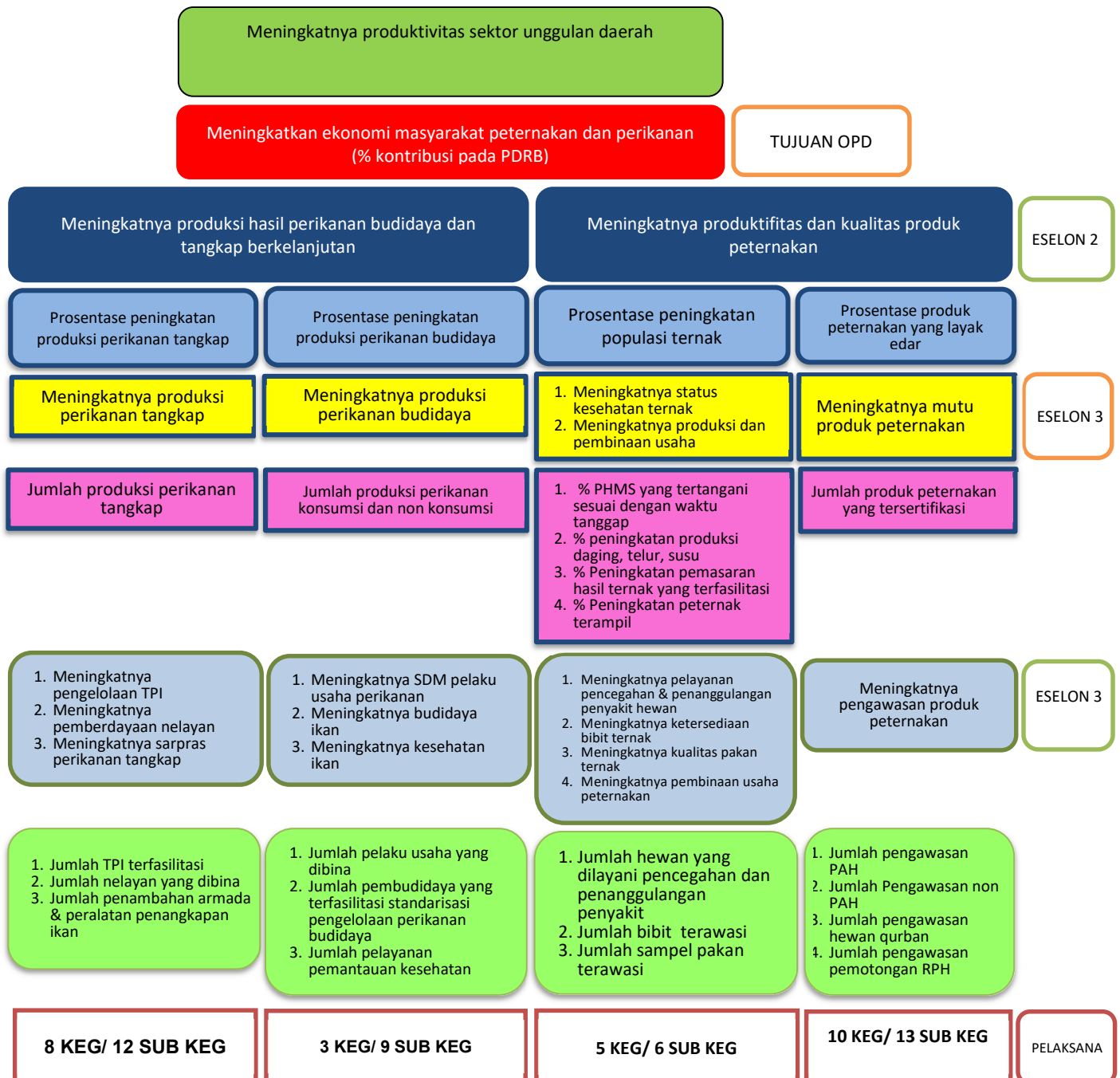
Strategi 6: Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4	Perspektif 4: Kuangan	-	-

Strategi 7: Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3	Perspektif 3: Kelembagaan		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4	Perspektif 4: Kuangan		



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penjabaran program dan kegiatan terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada pohon kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai berikut :





1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai Tribulan II

Evaluasi rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan dihitung hingga tribulan II pada tahun ini. Namun beberapa program kegiatan belum dapat dievaluasi dikarenakan perhitungannya diakhir tahun. Dengan hasil evaluasi berdasarkan target sebagai berikut:

1. Program Perikanan Tangkap

Pada tribulan II jumlah produksi tangkap terealisasi sebanyak 1.103 ton (41,38%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.663 ton. Tidak tercapainya target disebabkan cuaca alam yang tidak menentu sehingga diprediksi produksi perikanan tangkap tidak dapat mencapai target. Akan tetapi, produksi perikanan tangkap di tahun 2023 diprediksi meningkat dibandingkan dengan tahun lalu dengan perubahan target sebesar 2.300 ton. Adanya peningkatan produksi perikanan tangkap ini disebabkan adanya panen raya nelayan pada bulan September-Oktober tahun 2023 ini.

Selain adanya panen raya nelayan, untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan upaya peningkatan produksi PUD dengan restocking ikan perairan umum daratan (PUD) di Desa Sambigede Kecamatan Binangun dan kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja program perikanan tangkap. Dari keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan yang ada, target kinerja dan anggaran hingga tribulan II sudah mencapai target, adapun jika belum mencapai target dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada tribulan III dan tribulan IV. Adanya perubahan target pada kegiatan dan sub kegiatan dilakukan karena disesuaikan dengan anggaran.

2. Program Perikanan Budidaya

Indikator program Perikanan Budidaya adalah jumlah produksi perikanan konsumsi dan jumlah produksi perikanan non konsumsi. Jumlah produksi perikanan konsumsi hingga tribulan II 8.260,83 Ton (45%) dari target sebesar 18.158 Ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan non konsumsi hingga tribulan II sebanyak 97.960.679 ekor dari target sebanyak 229.522.500 ekor. Dari realisasi produksi perikanan konsumsi maupun non konsumsi hingga tribulan II tidak dapat mencapai target dikarenakan dari tahun 2021 adanya kenaikan pakan yang cukup signifikan



yang mengakibatkan biaya produksi tidak dapat mengimbangi harga jual ikan sehingga banyak pembudidaya yang gulung tikar maupun beralih ke komoditas lain. Adanya penurunan harga jual ikan gurami selama kurun waktu satu tahun juga mengakibatkan banyak pembudidaya gurami yang gulung tikar sehingga produksi tahun 2022 menurun drastis.

Tahun 2023 meskipun produksi tidak dapat tercapai dari target awal tahun, akan tetapi produksi perikanan konsumsi maupun non konsumsi dapat diprediksi meningkat dibandingkan tahun lalu saat masa pemulihan dari pandemik COVID-19.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator prosentase pengolahan produk perikanan hingga tribulan II terealisasi sebesar 157,5 Ton atau 5% dari total produksi perikanan konsumsi hingga tribulan II. Dengan begitu indikator dari program ini tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 20%. Untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan, Dinas Peternakan mengupayakan kegiatan-kegiatan seperti pembinaan kepada para pelaku usaha hasil perikanan, dan fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil.



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar Renja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar Periode Pelaksanaan 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=(12/7)*100 %		14=6+12		15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	RP	K	Rp	Ki
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	58.097.490.590,00			100	10.048.123.400,00	23	2.056.432.918	23	3.066.578.629					47	5.000.662.577	46,66667	0,49767	47	5.000.662.577	46,66667	8,56614E-10	5.000.662.577
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100	1.356.358.782,00			100	4.254.225,00	25	0	25	0					50	-	50	0	50	0	50	0	0



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	33.846.000,00		3	2.000.000,00	0	0	1	0				1	-	33,333333	0	1	0	238,09524	0	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1.322.512.782,00		5	2.254.225,00	1	0	2	0				3	-	60	0	3	0	600	0	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100	41.292.807.249,00		100	8.434.746.700,00	25	1.681.514.033	25	2.711.417.276				50	4.270.582.339	50	0,50631	50	4.270.582.339	50	1,22614E-09	4.270.582.339
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276	40.732.876.029,00		80	8.402.287.000,00	76	1.681.187.393	76	2.576.617.886				152	4.257.805.279	190	0,50674	152	4.257.805.279	68,84058	1,24407E-09	4.257.805.279
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	380	544.500.000,00		300	26.460.000,00	0	0	75	11.870.000				75	11.870.000	25	0,4486	75	11870000	6,5789474	8,23878E-08	11870000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	8.431.220,00		4	1.999.800,00	0	0	1	349.420				1	349.420	25	0,17473	1	349420	156,25	2,07239E-06	349420
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	3.500.000,00		5	1.500.000,00	0	0	1	155.000				1	155.000	20	0,10333	1	155000	100	2,95238E-06	155000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	18	3.500.000,00		18	2.499.900,00	4	326.640	4	76.000				8	402.640	44,444444	0,16106	8	402.640	246,91358	4,60178E-06	402.640
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	95	2.895.880.985,00		100	296.071.000,00	25	22396078	25	61.174.485				50	83.570.563	50	0,28227	50	83570563	52,631579	9,74713E-09	83570563



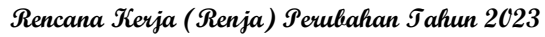
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62	102.256.0 00,00		6	1.497.000 ,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	827.122.6 70,00		23	4.966.000 ,00	0	0	3	4.206.0 00				3	4.206.0 00	13,043 478	0,84 696	3	420600 0	26,08 6957	1,023 98E- 07	420600 0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	803.000.0 00,00		3	1.620.000 ,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	65.000	412.300.0 00,00		6	19.520.00 0,00	0	0	6	0				6	-	100	0	6	0	0,153 8462	0	0	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000	751.202.2 88,00		6	268.468.0 00,00	3	22.396. 078	2	56.968. 485				5	79.364. 563	83,333 333	0,29 562	5	79.364. 563	4,166 6667	3,935 29E- 08	79.364. 563	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	95	1.625.109 .356,00		95	2.948.100 ,00	20	0	20	0				40	-	42,105 263	0	40	0	44,32 133	0	0	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	622.216.8 00,00		3	2.948.100 ,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	90	8.956.473 .752,00		100	1.185.020 .975,00	25	321.83 8.261	25	268.82 1.101				50	590.65 9.362	50	0,49 844	50	590.65 9.362	55,55 5556	5,565 11E- 09	590.65 9.362	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	73.821.05 0,00		12	4.150.000 ,00	3	375.00 0	3	1.695.0 00				6	2.070.0 00	50	0,49 88	6	2.070.0 00	83,33 3333	6,756 82E- 07	2.070.0 00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	1.224.076 .398,00		12	205.034.5 00,00	3	43.742. 982	3	37.826. 756				6	81.569. 738	50	0,39 783	6	81.569. 738	83,33 3333	3,250 08E- 08	81.569. 738	



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68	506.500.000,00		12	9.635.000,00	3	3.605.000	3	0				6	3.605.000	50	0,37416	6	3.605.000	73,529412	7,3871E-08	3.605.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	126	7.152.076.304,00		12	966.201.475,00	3	274.115.279	3	229.299.345				6	503.414.624	50	0,52102	6	503.414.624	39,68254	7,28494E-09	503.414.624
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	90	4.618.800.950,00		90	125.082.400,00	20	30.684.546,00	20	25.165.767				40	55.850.313	44,444444	0,44651	40	55.850.313,00	49,382716	9,66719E-09	55.850.313,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	2.505.681.000,00		15	123.210.000,00	6	30.684.546,00	4	25.165.767				10	55.850.313	66,666667	0,45329	10	55.850.313,00	105,82011	1,80906E-08	55.850.313,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	1.496.519.590,00		1	1.872.400,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya produksi hasil perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.300,00	4.609.750.319,00		2.663	773.518.000,00	155	0	948,00	24.055.500				1.103	24.055.500	41,419452	0,0311	1.103	24055500	1,8008457	6,74631E-10	24055500
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	145	992.800.655,00		25	25.000.000,00	0	0		16.822.000				0	16.822.000	0	0,67288	0	16822000	0	6,77759E-08	16822000

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar 27



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	2.113,00	296.980.250,00		1987	5.000.000,00	0	0		640.000				0	640.000	0	0,128	0	640000	0	4,31005E-08	640000
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	219.880.250,00		1	5.000.000,00	0	0	0	640.000				0	640.000	0	0,128	0	640000	0	5,82135E-08	640000
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	35	185.163.150,00		34	2.990.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	35	185.163.150,00		34	2.990.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	19708	17.154.680.036,00		18185	526.404.600,00	4.005	18.950.000	4.256,00	52.054.550				8.261	71.004.550	45,426615	0,13489	8.261	71.004.550	0,2304984	7,86292E-10	71.004.550
			Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias	236.477.261,00			229.522.500		48.690.299		49.270.380					97.960.679	-	42,68020739	#DIV/0!	97.960.679	0	1,80483E-05	#DIV/0!	0



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	489	9.143.057.961,00		123	251.868.000,00	10	14.790.000	10	6.010.000				20	20.800.000	16,260.163	0,08.258	20	20.800.000	3,325.1866	9,032.31E-10	20.800.000
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	367	8.865.706.311,00		3	248.868.000,00	1	14.790.000	1	6.010.000				2	20.800.000	66,666.667	0,08.358	2	20.800.000	18,16.5304	9,427.16E-10	20.800.000
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Keci	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	15	115.734.150,00		5	1.500.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	27	131.102.000,00		3	1.500.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	6	8.699.868.780,00		6	274.536.600,00		4.160.000	4	46.044.550				4	50.204.550	66,666.667	0,18.287	4	50.204.550	1111,1111	2,101.99E-09	50.204.550
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	73.261.200,00		1	9.999.800,00	1	3.200.000	1	3.279.800				2	6.479.800	200	0,64.799	2	6.479.800	4000	8,844.97E-07	6.479.800
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	1.505.600.300,00		1	10.000.000,00	0	0	1	8.700.000				1	8.700.000	100	0,87	1	8700000	2000	5,778.43E-08	8700000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	1.598.739.054,00		1	70.000.000,00	0	0		25.959.750				0	25.959.750	0	0,37085	0	25959750	0	2,31966E-08	25959750
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	800	2.978.319.655,00		120	25.000.000,00	33	0	20	1.760.000				53	1.760.000	44,166667	0,0704	53	1760000	5,5208333	2,36375E-09	1760000
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1667	2.543.948.572,00		30	159.536.800,00	8	960.000	10	6.345.000				18	7.305.000	60	0,04579	18	7.305.000	3,5992801	1,79991E-09	7.305.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Peningkatan produksi PUD	5	1.100.000.000,00		5	3.999.800,00	0	640000	27,5	640.000				27,5	1.280.000	550	0,32002	28	1280000	11000	2,90924E-08	1280000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	30	1.100.000.000,00		22	3.999.800,00	0	640.000,00	-	640.000,00				0	1.280.000	0	0,32002	0	1280000	0	2,90924E-08	1280000
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15	550.000.000,00		1	1.999.800,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15	550.000.000,00		1	2.000.000,00	0	640.000,00	-	640.000,00				0	1.280.000	0	0,64	0	1.280.000	0	1,16364E-07	1.280.000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pengolahan produk perikanan	26	676.830.0 00,00		20	453.350.4 00,00	2,5	0	2,5	7.548.0 00				5	7.548.0 00	25	0,01 665	5	754800 0	96,15 3846	2,45 99E- 09	754800 0
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	5	106.500.0 00,00		1	4.999.900 ,00	0	0		0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah/Ko- ta	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	106.500.0 00,00		1	4.999.900 ,00	0	0		0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	120	193.339.0 00,00		22	3.258.000 ,00	0	0	0	3.258.0 00				0	3.258.0 00	0	1	0	325800 0	0	5,172 26E- 07	325800 0



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	120	193.339.000,00		75	3.258.000,00	0	0	0	3.258.000				0	3.258.000	0	1	0	3258000	0	5,17226E-07	3258000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang disediakan	81,346	288.476.000,00		22.334,00	445.092.500,00	0	0	0	4.290.000				0	4.290.000	0	0,00964	0	4290000	0	3,34116E-09	4290000
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28	188.476.000,00		22	16.552.500,00	0	0	0	4.290.000				0	4.290.000	0	0,25918	0	4290000	0	1,37511E-07	4290000
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	8	100.000.000,00		2	428.540.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	0,3	21.841.439.800,00	0,3	1.529.399.500,00	0	70.111.341	0	72.267.541	#VALUE!	0,04725	0	72267541	#VALUE!	2,16342E-10	72267541		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan SDG	2	16.645.475.000,00	2	748.400.100,00	0	0	1	28.583.000	1	28.583.000	50	0,03819	1	28583000	2500	2,29445E-10	28583000
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	16	15.204.379.750,00	4	200.000.000,00	1	0	1	0	2	-	50	0	2	0	312,5	0	0
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	13	1.724.692.750,00	1	548.400.100,00	0	0	0	28.583.000	0	28.583.000	0	0,05212	0	28583000	0	3,02203E-09	28583000
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	13.150,00	2.045.208.500,00	11900	699.099.900,00	623	0	256	41.528.341	879	41.528.341	7,3865546	0,0594	879	41528341	0,0561715	2,90448E-09	41528341
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	15150	1.984.157.500,00	900	699.099.900,00	623	0	256	41.528.341	879	41.528.341	97,666667	0,0594	879	41528341	0,6446645	2,99384E-09	41528341



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang diawasi	332	124.750.000,00		65	5.000.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12	124.750.000,00		25	5.000.000,00	3	0	0	0				3	-	12	0	3	0	100	0	0
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	93	1.159.969.000,00		17	76.899.500,00	4	0	4	0				8	2.156.200	47,058.824	0,02.804	8	2156200	50,60.0886	2,417.24E-09	2156200
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	300	1.159.969.000,00		50	76.899.500,00	4	0	0	2.156.200				4	2.156.200	8	0,02.804	4	2156200	2,666.6667	2,417.24E-09	2156200
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	78	7.298.751.041,00		72	39.985.500,00	0	0		20.960.000				0	20.960.000	0	0,52.419	0	2096000	0	7,18.191E-09	2096000
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	6	6.619.926.041,00		7	39.985.500,00	0	0	1	20.960.000				1	20.960.000	14,285.714	0,52.419	1	2096000	238,0.9524	7,918.37E-09	2096000
		Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	4.249.957.291,00		3	29.985.500,00	0	0	1	20.960.000				1	20.960.000	33,333.333	0,69.9	1	2096000	666,6.6667	1,644.73E-08	2096000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	2.369.968.750,00		2	10.000.000,00	0	0	0	0				0	-	0	0	0	0	0	0	0
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi	34	11.936.283.579,00		28	407.075.800,00	0	16.579.000	3	73.237.150				3	89.816.150	10.714.286	0,22064	3	89.816.150	31,512605	1,84846E-09	89.816.150
			Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	88			3		0							0	-	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	65	2.365.311.717,00		100	50.000.000,00	25	5.776.000	25	7.306.000				50	13.082.000	50	0,26164	50	13.082.000	76,923077	1,10615E-08	13.082.000
		Pengendalian dan Penanggulang an Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	550	2.365.311.717,00		62	50.000.000,00	17	5.776.000	22	7.306.000				39	13.082.000	62,903226	0,26164	39	13.082.000	11,43695	1,10615E-08	13.082.000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	2300	671.561.000,00		451	5.000.000,00	10	0	98	0				108	-	23,946785	0	108	0	1,0411646	0	0
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2300	213.678.500,00		400	5.000.000,00	110	0	98	0				208	-	52	0	208	0	2,2608696	0	0
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	19850	5.192.627.396,00		3950	220.575.000,00	3.776	5.776.000	3822	5.540.000				7.598	11.316.000	192,35443	0,0513	7.598	11.316.000	0,96904	9,87983E-10	11.316.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	17200	2.786.099.372,00		3200	30.000.000,00	3.648	5.776.000	3671	5.540.000				7.319	11.316.000	228,71875	0,3772	7.319	11.316.000	1,3297602	1,35386E-08	11.316.000
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2650	2.393.208.988,00		700	190.575.000,00	128	0	151	0				279	-	39,857143	0	279	0	1,5040431	0	0
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	390	1.569.998.466,00		360	25.000.550,00	55	5.027.000	95	3.533.000				150	8.560.000	41,666667	0,34239	150	8.560.000	10,683761	2,18085E-08	8.560.000
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	90	882.552.966,00		45	5.000.200,00	10	1.600.000	13	1.600.000				23	3.200.000	51,111111	0,63997	23	3.200.000	56,790123	7,2514E-08	3.200.000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	250	351.665.000,00		200	10.000.100,00	28	2.092.000	44	1.933.000					72	4.025.000	36	0,4025	72	4.025.000	14,4	1,14454E-07	4.025.000
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	250	335.780.500,00		70	10.000.250,00	17	1.335.000	38	0					55	1.335.000	78,571429	0,1335	55	1.335.000	31,428571	3,97571E-08	1.335.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	20000	2.136.785.000,00		3900	106.500.250,00	0	0	0	56.858.150					0	56.858.150	0	0,53388	0	56858150	0	2,49851E-08	56858150
		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	83400	2.136.785.000,00		255	106.500.250,00	0	0	0	56.858.150					0	56.858.150	0	0,53388	0	56858150	0	2,49851E-08	56858150
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan	100	2.591.365.819,00		100	10.000.000,00	25	0	25	1.186.000					50	1.186.000	50	0,1186	50	1186000	50	4,57674E-09	1186000
		Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	3	2.591.365.819,00		3	10.000.000,00	1	0	1	1.186.000					2	1.186.000	66,666667	0,1186	2	1186000	2222,2222	4,57674E-09	1186000
		Penanggulan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	3	2.591.365.819,00		10	10.000.000,00	1	0	1	1.186.000					2	1.186.000	20	0,1186	2	1186000	666,66667	4,57674E-09	1186000
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Peningkatan Jumlah Pengajuan Perijinan	20	2.503.711.385,00		20	4.830.000,00	6	1.120.000		0					6	1.600.000	30	0,33126	6	1.600.000	150	1,32309E-08	1.600.000



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	zin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	23	192.051.000,00		5	3.000.000,00	1	1.120.000	9						10	1.600.000	200	0,53333	10	1.600.000	869,56522	2,77704E-07	1.600.000
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi	39	192.051.000,00		12	3.000.000,00	6	1.120.000	10	480.000					16	1.600.000	133,33333	0,53333	16	1.600.000	341,88034	2,77704E-07	1.600.000
		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Fasilitas Izin Usaha Obat Hewan Yang diterbitkan	5	76.974.000,00		2	1.830.000,00	0	0	0	0					0	-	0	0	0	0	0	0	0
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	10	76.974.000,00		2	1.830.000,00	0	0	0	0					0	-	0	0	0	0	0	0	0
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan peternak terampil	8	7.852.976.480,00		8	239.868.000,00	0	5.210.000	0	5.336.108					0	10.546.108	0	0,04397	0	10.546.108	0	5,59868E-10	10.546.108
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	420	7.852.976.480,00		240	239.868.000,00	0	5.210.000	20	5.336.108					20	10.546.108	8,3333333	0,04397	20	10.546.108	1,984127	5,59868E-10	10.546.108
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	7.852.976.480,00		10	239.868.000,00	0	5.210.000	5	5.336.108					5	10.546.108	50	0,04397	5	10.546.108	50	5,59868E-10	10.546.108



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Rencana Strategis yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

1. Besarnya potensi perikanan budidaya di Kabupaten Blitar, serta besarnya potensi pasar perikanan budidaya (ikan konsumsi maupun ikan hias) baik itu secara nasional maupun internasional. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya. Hal diatas dapat tercapai dengan adanya kondisi lingkungan perikanan yang optimal.
2. Besarnya potensi perikanan tangkap baik itu di wilayah laut maupun di perairan umum daratan (sungai) sehingga perlu adanya optimalisasi sumber daya tersebut dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas hasil tangkap.
3. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar berusaha di subsektor peternakan baik itu ternak unggas, ternak besar maupun kecil. Untuk mendukung potensi ini diperlukan pembinaan serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam meningkatkan produksi dan kualitas produk peternakan. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan usaha, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, fasilitasi pemasaran serta pembinaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk peternakan yang ASUH.
4. Perlu adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana administrasi bagi aparatur sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 Dinas Peternakan dan Perikanan akan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian. Urusan kelautan dan perikanan terdiri dari 2 (dua) program yang akan dilaksanakan pada 15 wilayah kecamatan yang mempunyai potensi perikanan budidaya serta wilayah potensi perikanan tangkap meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto,



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Panggungrejo, Wates, Binangun, Kesamben, Kanigoro, Sutojayan, Selopuro, Talun, Sanankulon, Srengat, Gandusari dan Kademangan. Sedangkan urusan pertanian terdiri dari 5 (lima) program yang dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar.

Rencana kerja Perubahan tahun 2023 juga mengakomodir program dan kegiatan sesuai amanat RKPD meliputi:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang berfokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengelolaan perairan umum daratan (PUD), pengelolaan TPI, peningkatan cakupan bina nelayan serta pengelolaan kapal nelayan sebagai prasarana utama.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan yang berfokus pada perizinan usaha perikanan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang meliputi pengawasan usaha perikanan tangkap dan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang meliputi penyediaan data dan informasi usaha pemasaran hasil perikanan, bimbingan pelaku usaha pemasaran hasil perikanan serta peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yang berfokus pada penyediaan sarana peternakan yang meliputi bibit, pakan dan obat ternak.



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang berfokus pada penyediaan prasarana peternakan yang terdiri dari pasar hewan terpadu dan Rumah Potong Hewan (RPH), jalan usaha tani, jaringan irigasi usaha tani.

6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, pengawasan dan penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

7. Program Pengendalian Bencana Pertanian

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang meliputi penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis.

8. Program Perizinan Usaha Pertanian

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang berfokus pada fasilitasi izin usaha budidaya peternakan, izin pelayanan Kesehatan hewan/ jasa medik veteriner dan izin usaha penyediaan sarana/obat hewan di wilayah Kabupaten Blitar.

9. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan SDM serta kelembagaan peternak. Pada Perubahan Anggaran Ini terdapat penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DBCHT terjadi pergeseran sub kegiatan dana DBCHT dari Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa menjadi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.



10. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan SDM serta kelembagaan peternak. Pada Perubahan Anggaran Ini terdapat penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantaun dan Evaluasi DBCHT terjadi pergeseran sub kegiatan dana DBCHT dari Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa menjadi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

Selanjutnya rencana kerja program dan kegiatan tahun 2023 disusun dengan rincian pagu pendanaan sebagai berikut:



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prelimin Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prelimin Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah				
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											17,542,530,230					
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	5,977,190,220	11,005,390,200	11,542,982,850							
3	25	01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat valid dan sesuai dengan peraturan	%		%	100 %	100 %	5,857,190,220	10,048,123,400	10,070,855,050		100 %	11,544,408,449				
3	25	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat valid dan sesuai dengan peraturan	%		%	100 %	100 %	31,428,295	4,254,225	4,290,785		100 %	252,200,000				
3	25	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum			Dokumen perencanaan n, Pengangg an serta Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	2,200,000	Dinas Perencanaan dan Perikanan
3	25	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan	29,428,295	2,254,225	2,290,785	Kab. Bitter Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum			Dokumen perencanaan n, Pengangg an serta Evaluasi Kinerja	5 Laporan	250,000,000	Dinas Perencanaan dan Perikanan
3	25	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat valid dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	7,220,880,900	8,434,748,700	8,431,521,400					100 %	5,881,408,449	
3	25	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	7,167,590,400	3,402,287,000	3,402,287,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum			Laporan Administ ras / Keu angan Perang kat Daerah	78 Orang/bulan	3,362,284,449	Dinas Perencanaan dan Perikanan
3	25	01	2.02	03		Pelaksanaan Pembastaaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembastaaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			200 Dokumen	200 Dokumen	45,840,000	28,680,000	28,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum			Laporan Administ ras / Keu angan Perang kat Daerah	200 Dokumen	90,000,000	Dinas Perencanaan dan Perikanan
3	25	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000	1,999,800	940,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum			Laporan Administ ras / Keu angan Perang kat Daerah	4 Dokumen	2,622,000	Dinas Perencanaan dan Perikanan



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prestasi Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	5 Dokumen	2,032,500	1,500,000	750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,200,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	14 Laporan	2,000,000	2,499,900	1,000,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	2,200,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan
3	25	01	2.03		Administrasi Kepagawean Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepagawean Perangkat Daerah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	1,980,000	0	0						100 Orang	60,000,000	
3	25	01	2.03	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				78 Orang	78 Orang	1,930,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pelayanan Administrasi Kepagawea n	78 Orang	60,000,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%		%	95 %	95 %	250,925,150	296,071,000	279,622,700						95 %	506,100,000	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	2,625,400	1,497,000	692,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan administrasi umum perkantora n	1 Paket	17,600,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	4 Paket	22,177,500	4,966,000	5,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan administrasi umum perkantora n	4 Paket	176,000,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	30,000,000	1,620,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan administrasi umum perkantora n	0 Paket	142,000,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	27,060,000	19,520,000	7,261,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan administrasi umum perkantora n	6 Paket	71,500,000	Dinas Pelayanan dan Perikanan



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Preklinean Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Preklinean Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
2	25	01	2.06	09				12 Laporan	12 Laporan	117,061,250	285,462,000	285,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Layanan administrasi umum pelayanan n	12 Laporan	100,000,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan
3	25	01	2.07				95 %	95 %	3,514,100	2,945,100	196,000						95 %	150,500,000		
2	25	01	2.07	05				1 Paket	1 Paket	386,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pengadaan BIVN	1 Paket	60,500,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan
2	25	01	2.07	06				2 Unit	1 Unit	2,945,100	2,945,100	196,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pengadaan BIVN	1 Unit	90,000,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan
3	25	01	2.08				100 %	100 %	1,201,183,375	1,185,020,975	1,225,985,765						100 %	1,588,000,000		
2	25	01	2.08	01				12 Laporan	12 Laporan	4,765,000	4,150,000	4,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa pernunjng urusan pemerintah daerah	12 Laporan	12,705,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan
2	25	01	2.08	02				12 Laporan	12 Laporan	205,024,500	205,024,500	177,542,222	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa pernunjng urusan pemerintah daerah	12 Laporan	200,000,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan
2	25	01	2.08	03				12 Laporan	12 Laporan	25,182,400	9,625,000	9,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa pernunjng urusan pemerintah daerah	12 Laporan	80,000,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan
2	25	01	2.08	04				12 Laporan	12 Laporan	966,201,475	966,201,475	1,022,556,542	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa pernunjng urusan pemerintah daerah	12 Laporan	1,287,295,000	Dinas Pernikahan dan Perikanan



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Praktik Meju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APSD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	01	2.09	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	%	90 %	90 %	146,998,400	125,082,400	131,238,400					90 %	624,200,000			
2	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sagu Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	15 Unit	162,254,000	122,210,000	122,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Sarang Milik Negara	15 Unit	660,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	25	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	1,772,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Sarang Milik Negara	1 Unit	24,200,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1,872,400	1,872,400	5,028,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Sarang Milik Negara	1 Unit	160,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Ton	2.200 Ton		489,894,000	780,358,000	773,518,000					2.200 Ton	1,221,583,880		
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dihusahkan dalam 1 (Sedu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang diberikan pengelolaan penangkapan ikan	nelayan	nelayan	25 nelayan	10 nelayan	74,879,000	25,000,000	25,000,000					10 nelayan	106,020,000		
2	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Rencan Datar dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			nelayan PUD	1 Dokumen	14,520,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	25	02	2.01	02	Penjaminan Keterlaksanaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			2 Unit	1 Unit	64,879,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		PP-1 Peningkatan Alokasi Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial	nelayan PUD	92,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode				Unsur/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sebaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perengjort Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	25	03	2.02	Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang dibudayakan	Nelayan		Nelayan	255 Nelayan	425 Nelayan	354,992,500	747,365,000	740,528,000				425 Nelayan	857,995,880				
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			80 Orang	275 Orang	288,980,500	730,868,000	724,038,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Risk			Pembudayaan nelayan kecil	275 Orang	438,750,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kalambeagan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kalambeagannya			50 Kelompok	20 Kelompok	57,480,000	12,500,000	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pembudayaan nelayan kecil	20 Kelompok	109,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			15 Unit Usaha	2 Unit Usaha	10,572,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pembudayaan nelayan kecil	2 Unit Usaha	102,762,680	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3	25	03	2.02		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produk Perikanan di TPI	Ton	Ton	1981 Ton	1280 Ton	35,000,000	5,000,000	5,000,000					1280 Ton	423,500,000			
3	25	03	2.02	02	Relayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			1 Layanan	1 Layanan	25,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			TPI Tambora	1 Layanan	422,500,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berkurung sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	unit kapal	unit kapal	24 Unit kapal	40 unit kapal	5,022,500	2,990,000	2,990,000					40 unit kapal	32,085,000			



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode				Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prestasi Maju Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3	25	03	2.04	02	Realisasi Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan			34 Rekomendasi	34 Rekomendasi	5.022,500	2.990,000	2.990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kapal Perikanan dibawah 10 GT	40 Rekomendasi	32,065,000	Dinas Perikanan dan Perikanan	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi/hias	Ton Dkar		Ton Dkar	18.420 Ton 204.150.250 Dkar	585,000,000	528,404,800	541,154,800					18.420 Ton 204.150.250 Dkar	3,859,590,127			
3	25	04	2.02		Pembudayaan Ikan Kacil yang dibudidayakan	Jumlah Pembudidayaan Ikan Kacil yang dibudidayakan	pembudidayaan		pembudidayaan	822 pembudidayaan	822 pembudidayaan	120,000,000	251,585,000	261,585,000				80 pembudidayaan	2,259,649,827			
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kacil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kacil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			2 Kelompok	2 Kelompok	107,000,000	245,888,000	250,888,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembudi Daya Ikan Kacil	2 Kelompok	2,215,454,827	Dinas Perikanan dan Perikanan	
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembantuan dan Pengembangan Kelayakan Pembudi Daya Ikan Kacil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kacil yang Mengikuti Pembantuan dan Pengembangan Kelayakan			5 Kelompok	2 Kelompok	7,600,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembudi Daya Ikan Kacil	2 Kelompok	19,985,000	Dinas Perikanan dan Perikanan	
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang berfasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			2 Kelompok	2 Kelompok	5,400,000	1,500,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pembudi Daya Ikan Kacil	2 Kelompok	24,200,000	Dinas Perikanan dan Perikanan	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	6 Jenis	5 Jenis	445,000,000	274,538,800	279,288,800				5 Jenis	1,399,940,500			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	9,999,800	9,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Perek- Bidang Kelautan dan Perikanan- Pengawasan			Pembudidayaan ikan konsumsi dan hias	1 Dokumen	105,925,230	Dinas Perikanan dan Perikanan	



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktik Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Praktik Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
2	25	04	2.00	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Unit	1 Unit	20,000,000	10,000,000	2,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pembudi- daya ikan konsums dan hasil	1 Unit	109,265,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	25	04	2.00	03	Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Unit	1 Unit	100,000,000	70,000,000	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PP-2 Pemanfaatan Tata Kelola Pemanfaatan, Penguatan SUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Pembudi- daya ikan konsums dan hasil	1 Unit	110,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	25	04	2.00	04	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan ikan					100 Dokumen	80 Dokumen	75,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Perek- si- Kekayaan dan Perikanan- Pengawasan			Pembudi- daya ikan konsums dan hasil	80 Dokumen	475,888,900	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	25	04	2.00	05	Pembinaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemanfaatan Pembudidayaan ikan di Darat					20 Orang	20 Orang	220,000,000	159,536,800	164,488,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pembudi- daya ikan konsums dan hasil	20 Orang	428,750,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Peningkatan produksi PUD	%		%		5 %	5 %	10,108,000	3,999,800	3,999,800						5 %	280,000,000	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dikuasakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diawasi	pelaku Usaha		pelaku Usaha		22 orang/kelompok	18 orang/kelompok	10,108,000	3,999,800	3,999,800						18 pelaku Usaha	280,000,000	



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

tahun 2023																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Predikasin Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakirasin Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Semula	Menjadi	RKPD 2023			APBD 2023					RKPD 2023 Perubahan	Nasional
3	27	02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	200,000,000	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Sumber Daya Genetik Hewan	10 Dokumen	2,999,750,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	02	202	02	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	543,400,100	262,853,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP-1 Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial	Sumber Daya Genetik Hewan	1 Dokumen	240,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	02	202		Peningkatan Mutu dan Penedaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	sampel Bibit/ Pakan		sampel Bibit/ Pakan	11900 sampel Bibit/ Pakan	2200 sampel Bibit/ Pakan	300,000,000	699,099,900	685,321,100						1200 sampel Bibit/ Pakan	395,250,000	
3	27	02	202	02	Pengawasan Penedaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar				900 Laporan	725 Laporan	200,000,000	699,099,900	685,321,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	PP-2 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan SUM/D dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Mutu dan Penedaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak		725 Laporan	392,250,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	02	204		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengedar	Jumlah Usaha Penedaran Obat Hewan yang diawasi	Unit Usaha		Unit Usaha	85 Unit Usaha	20 Unit Usaha	15,000,000	5,000,000	5,000,000						20 Unit Usaha	25,000,000	
3	27	02	204	01	Pemantauan Mutu, Keaslian dan Keamanan Penedaran Obat Hewan	Jumlah Pemantauan Mutu, Keaslian dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				25 Laporan	25 Laporan	15,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Penedaran dan pengguna n Obat Hewan	25 Laporan	25,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	02	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiri yang diawasi	Unit Usaha		Unit Usaha	8 Unit Usaha		135,000,000	78,899,500	78,899,500						8 Unit Usaha	229,900,000	



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prediksen Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prediksen Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan					50 Laporan	4 Laporan			125,000,000	76,899,500	76,899,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Unit Usaha Pakan ternak	4 Laporan	229,900,000	Dinas Peternakan dan Perikanan	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana peternakan layak fungsi	%		%			65 %				64,297,500	39,985,500	30,485,500				65 %	1,352,000,000			
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	Unit		Unit		7 Unit	5 Unit				64,297,500	39,985,500	30,485,500				5 Unit	1,352,000,000			
3	27	02	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					2 Unit	2 Unit				62,997,500	29,985,500	29,985,500	Kab. Blitar, Srengat, Kauman, Kab. Blitar, Kademang, Kademang, Kab. Blitar, Wings, Tanggol	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		PP-3 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan SUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Prasana peternakan	2 Unit	888,250,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	02	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					2 Unit	2 Unit				15,000,000	10,000,000	480,000	Kab. Blitar, Srengat, Kauman Kab. Blitar, Wings, Tanggol	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Prasana peternakan	2 Unit	491,750,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Produk Peternakan yang Tersertifikasi Presentase Penyakit Hewan Menular yang Terlindungi Sesuai dengan Undang- Undang	Sertifikat %		Sertifikat %			21 Sertifikat 55 %				805,000,000	407,075,800	434,076,050					21 Sertifikat 55 %	2,438,478,912		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	%		%		100 %	100 %				100,000,000	50,000,000	50,000,000					100 %	486,643,949		



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

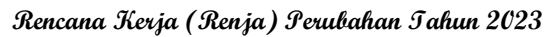
Kode					Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Predikasin Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prediksin Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																	Nasional					Daerah
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Peninggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Peninggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				62 Laporan	50 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Kesehatan hewan/ ternak	50 Laporan	435,545,940	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemusulan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemusulan dan Pengawasan Ternak yang di sertifikasi	Dokumen		Dokumen	451 Dokumen	400 Dokumen	20,000,000	5,000,000	5,000,000					Pemusulan dan pengeluaran ternak	200 Dokumen	42,350,000	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Pemusulan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Pemusulan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				400 Laporan	200 Laporan	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pemusulan dan pengeluaran ternak	200 Laporan	42,350,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	Pelayanan		Pelayanan	2250 Pelayanan	180 Pelayanan	485,000,000	220,575,000	250,575,000					Pelayanan Kesehatan Hewan	220 Pelayanan	1,168,430,985	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				3200 Laporan	150 Laporan	115,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pelayanan Kesehatan Hewan	150 Laporan	635,250,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				700 Laporan	240 Laporan	370,000,000	190,575,000	170,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Non Reli			Pelayanan Kesehatan Hewan	240 Laporan	531,180,985	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha diterapkan dan diawasi pelayanan teknis kesehatan masyarakat	Unit Usaha		Unit Usaha	260 Unit Usaha	100 Unit Usaha	50,000,000	25,000,550	25,000,550					100 Unit Usaha	319,550,000		



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 27 04 201 01	Pengendalian dan Peningkatan Rantai Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Peningkatan Rantai Hewan dan Zoonosis				82 Laporan	50 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Kesehatan hewan/ ternak		50 Laporan	400,545,949	Dinas Peternakan dan Perikanan
3 27 04 202	Pengawasan Pemusulan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemusulan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	Dokumen		Dokumen	451 Dokumen	600 Dokumen	20,000,000	5,000,000	5,000,000							200 Dokumen	42,350,000	
3 27 04 202 02	Pengawasan atas Penerapan Peraturan Teknis untuk Pemusulan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Peraturan Teknis untuk Pemusulan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				400 Laporan	200 Laporan	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pemusulan dan pengeluaran ternak		200 Laporan	42,350,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3 27 04 203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	Pelayanan		Pelayanan	2950 Pelayanan	880 Pelayanan	485,000,000	220,575,000	250,575,000							290 Pelayanan	1,168,430,983	
3 27 04 203 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				2200 Laporan	150 Laporan	115,000,000	20,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Pelayanan Kesehatan Hewan		150 Laporan	635,250,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3 27 04 203 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				700 Laporan	240 Laporan	270,000,000	120,575,000	170,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Non Rata			Pelayanan Kesehatan Hewan		240 Laporan	521,120,983	Dinas Peternakan dan Perikanan
3 27 04 204	Penerapan dan Pengawasan Penerapan Peraturan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit usaha diterapkan dan diawasi penerapan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Unit Usaha		Unit Usaha	260 Unit Usaha	160 Unit Usaha	50,000,000	25,000,550	25,000,550							160 Unit Usaha	319,550,000	



Kode				Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prelimin Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prestasi Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Manjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3	27	06	2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Sabit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Izin Usaha		Izin Usaha	5 Izin Usaha	15 Izin Usaha	10,000,000	3,000,000	3,000,000					15 Izin Usaha	14,000,000			
3	27	06	2.02	04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi			12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Tenaga Medik Veteriner, Para Medik Veteriner	12 Laporan	14,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	06	2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Izin Usaha		Izin Usaha	1 Izin Usaha		10,000,000	1,850,000	1,850,000					1 Izin Usaha	15,400,000		
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi			2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	1,850,000	1,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			Usaha pengecer Obat Hewan	2 Laporan	15,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan peternak ternak ternak	%		%	0,11 %		320,000,000	239,868,000	243,232,000					0,11 %	1,422,615,500		
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	orang		orang	200 orang	200 orang	320,000,000	239,868,000	243,232,000					200 orang	1,422,615,500		
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10 Kelembagaan	10 Kelembagaan	320,000,000	239,868,000	243,232,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, DSH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			0	10 Kelembagaan	1,422,615,500	Dinas Peternakan dan Perikanan
TOTAL											12,002,187,720	14,036,555,000	14,108,840,000						27,262,065,786		



BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA P OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2023, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Kabupaten Blitar dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
2. Bahwa untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 2021 – 2026 maka ditetapkan Program dan kegiatan tahunan serta kebijakan/ strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/ kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.
3. Bahwa Program dan kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2023 dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (peternak dan petani ikan) dalam upaya peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan serta peningkatan produk-produk ternak dan ikan unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta bahan baku industri melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan serta upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA P OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2023 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.